**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang krusial di Kota Padang. Cukup seriusnya permasalahan kemiskinanan yang dihadapi Kota Padang tergambar dari masih relatif tingginya jumlah warga miskin yang ada di Kota Padang. Berdasarkan data dari BPS angka kemiskinan di Kota Padang adalah 51.700 KK dengan ukuran garis kemiskinan Rp. 237.999,- per orang/kapita/bulan. Pada tahun 2009 angka kemiskinan turun menjadi 46.800 KK dengan garis kemiskinan Rp. 272.329,- per orang/kapita/bulan. Data kemiskinan pada tahun 2010 menunjukkan kembali terjadinya peningkatan jumlah masyarakat miskin, yaitu 52.700 KK dengan garis kemiskinan Rp. 306.108,- per orang/kapita/bulan.[[1]](#footnote-1) Dari sini dapat kita lihat bahwa angka kemiskinan masih sangat fluktuatif, bisa turun dan bisa juga naik. Hal ini juga menjelaskan bahwa penanganan kemiskinan belum lagi komprehensif sehingga tidak bisa terus menekan laju kemiskinan tersebut.

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan masih merupakan prioritas bagi multipihak terutama pemerintah. Hal ini karena kemiskinan membawa dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Kemiskinan menyebabkan tingginya angka putus sekolah, lemahnya akses terhadap sarana kesehatan, meningkatnya kekerasan, kiminalitas, dan konflik sosial, serta kemiskinan menyebabkan lambatnya laju pertumbuhan ekonomi.[[2]](#footnote-2) Pada akhirnya, kemiskinan cenderung melahirkan kemiskinan yang baru.

Tak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan masih menjadi masalah kronis di Indonesia. Masalah ini seperti penyakit komplikasi. Morbiditas yang besar, pendidikan yang kurang, serta pengangguran yang tinggi merupakan mata rantai kemiskinan yang tidak pernah dapat diputus.

Banyak program pengentasan kemiskinan telah diupayakan pemerintah selaku penyelenggara negara sekaligus sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas persoalan ini. Salah satu di antaranya adalah BLT (Bantuan Langsung Tunai). Akan tetapi, program ini masih dirasakan belum banyak keberhasilannya. Seringkali hasil yang dicapai tidak efisien dan tidak tepat sasaran. BLT untuk masyarakat miskin pada masa lalu ternyata lebih banyak dimanfaatkan penerimanya untuk pembelanjaan berbagai barang yang bersifat kesenangan seperti rokok, *compact disk*, dan radio.[[3]](#footnote-3)

Selain program BLT, Pemerintah juga melaksanakan program perlindungan sosial seperti beasiswa bagi siswa miskin, Jamkesmas, Jampersal, raskin, dan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Namun program ini belum menjawab kebutuhan masyarakat miskin terutama untuk mengangkat derajat kehidupan mereka dari kemiskinan itu sendiri.

Tampaknya benar bahwa banyak yang belum mengerti bagaimana mengawali upaya penanggulangan kemiskinan. Ini yang barangkali menjadi sebab mengapa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh banyak pihak ternyata tidak efektif dalam mengurangi angka kemiskinan. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan memutus mata rantai kemiskinan yaitu melalui pemberdayaan kelompok dengan pengembangan *microfinance*, yakni suatu model penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat mengakses bank karena berbagai keterbatasannya.[[4]](#footnote-4)

Ada banyak kelompok usaha-usaha kecil yang tidak bisa mengakses sumber modal, seperti Bank. Pangsa pasar bank pada umumnya adalah usaha-usaha menengah ke atas yang bisa menjamin kelancaran pengembalian kredit. Sehingga pengusaha-pengusaha kecil tidak pernah dilirik oleh bank.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah salah satu jawaban permasalahan tersebut. Tanpa LKM masyarakat miskin hanya akan menggantungkan pembiayaan pada kemampuan sendiri yang sangat terbatas atau kepada lembaga keuangan informal, seperti rentenir atau tengkulak. Prinsip dari kegiatan lembaga ini adalah memobilisasi dana dari kelompok masyarakat yang mengalami surplus dana dan mengalokasikannya kepada kelompok masyarakat yang kekurangan dana.[[5]](#footnote-5)

Dalam rangka itu, pemerintah saat ini sedang berupaya menggalakkan program koperasi yang menyediakan kemudahan akses modal kepada masyarakat miskin. Melihat perkembangan perkembangan lembaga keuangan Islam, pemerintah pun mendirikan lembaga keuangan mikro syari’ah yang disebut dengan KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah) yaitu koperasi dengan prinsip syari’ah yang disebut dengan KJKS BMT.

Di kota Padang, saat ini telah ada 74 KJKS BMT yang didirikan di 74 kelurahan. Pemerintah sendiri mencanangkan 104 KJKS BMT di 104 kelurahan di Kota Padang. Dalam rangka mewujudkan rencana tersebut, telah didirikan 54 KJKS BMT pada tahun 2010. Pada tahun 2011, pemerintah juga telah mendirikan 20 KJKS BMT di kelurahan yang berbeda. Di tahun 2012 ini pemerintah sedang memproses berdirinya 30 KJKS BMT di kelurahan yang belum memiliki KJKS BMT.[[6]](#footnote-6)

Dana awal KJKS BMT berasal dari pendiri koperasi dan dana hibah dari pemerintah (Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Provinsi Sumbar). Dana pemerintah ini merupakan hibah *muqayyadah* yang harus disalurkan secara bergulir kepada kelompok masyarakat miskin yang mempunyai usaha. 54 KJKS BMT tahap pertama telah diberikan dana hibah Rp. 300.000.000,- sebagai modal awal pendiriannya. Sedangkan 20 KJKS BMT tahap kedua dan tahap selanjutnya tidak diberikan dana hibah karena ia merupakan transformasi dari KMK (Kredit Mikro Kelurahan) yang didirikan pemerintah tahun 2008 dan 2009 dan sudah mendapatkan bantuan modal sejumlah yang sama sebelumnya.[[7]](#footnote-7)

Pemerintah Kota Padang telah berupaya untuk mengangkat kehidupan  ekonomi warganya dengan program pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) yang mempunyai kekuatan hukum pada masing-masing kelurahan, jelas Wakil Walikota Padang  H. Mahyeldi Ansharullah, SP. pada acara sosialisasi bimbingan teknis organisasi dan menajemen bagi pengurus dan pengawas KJKS BMT kelurahan se-Kota Padang di  UPTD Balai Diklat Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Barat.[[8]](#footnote-8)

KJKS BMT Kota Padang didirikan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengangkat kehidupan  ekonomi masyarakat, terutama masyarakat miskin. Namun dalam prakteknya, sudahkah KJKS BMT Kota Padang sebagai salah satu unit Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah ini berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat miskin (seperti cita-cita pendiriannya)? Pertanyaan inilah yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian ini. Oleh sebab itu, penulis mengangkat tesis berjudul, “Peranan KJKS BMT Kota Padang dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Miskin.”

1. **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan KJKS BMT Kota Padang dalam meningkatkan ekonomi masyarakat miskin.

1. **Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

* 1. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini akan dilihat pada aspek pembiayaan dan pembinaan yang dilakukan KJKS kepada nasabah.
	2. Peranan KJKS yang diteliti adalah dari tahun 2010 s/d 2012
	3. Penelitian ini mengambil lokasi di KJKS BMT Kelurahan Padang Besi, KJKS BMT Kelurahan Cengkeh, dan KJKS BMT Kelurahan Jati Baru.
1. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengkaji peranan KJKS BMT Kota Padang dalam meningkatkan ekonomi masyarakat miskin.

1. **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, kajian ini akan memperkaya khazanah pengetahuan seputar peranan lembaga keuangan mikro syari’ah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat miskin dan dapat menjadi bahan rujukan untuk kajian sejenis.
2. Secara praktis, kajian ini berguna bagi pemerintah kota Padang dan juga KJKS BMT Kota Padang dalam merefleksi sejauhmana program ini berperan dalam menigkatkan ekonomi masyarakat miskin dan juga berguna dalam menentukan arah kebijakan terhadap KJKS BMT ke depannya.
3. Secara akademis, penelitian ini merupakan salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ekonomi Islam Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang.
4. **Definisi Operasional**

Judul tesis ini adalah “Peranan KJKS BMT Kota Padang dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Miskin.” Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami judul, maka beberapa istilah perlu diberikan penjelasan.

* 1. Peranan

Peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bagian yang dimainkan seorang pemain.[[9]](#footnote-9) Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagian yang dimainkan oleh KJKS dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat miskin.

* 1. KJKS BMT

KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (*syari’ah*).[[10]](#footnote-10) KJKS BMT (Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Baitul Mal Wat Tamwil) yaitu sistem intermediasi keuangan di tingkat mikro yang berbadan hukum koperasi yang di dalamnya terdapat *baitul mal* dan *baitul tamwil* yang di dalam operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip syari’ah.[[11]](#footnote-11) KJKS BMT Kota Padang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah KJKS BMT Padang Amanat Sejahtera (yang sekarang dikenal dengan nama KJKS BMT Kota Padang) yang didirikan oleh pemerintahan Kota Padang.

* 1. Ekonomi

Ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan.[[12]](#footnote-12) Ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala yang berkaitan dengan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi serta kekayaan individu.

* 1. Miskin

Sesungguhnya ada banyak sekali definisi tentang miskin. Miskin menurut KBBI adalah tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah).[[13]](#footnote-13) Dalam kamus ilmu-ilmu sosial yang ditulis oleh Hugo F. Reading, miskin (*poverty*) didefinisikan sebagai individu atau keluarga yang tidak berkecukupan dalam hak milik, pendapatan, dan pelayanan-pelayanan umum.[[14]](#footnote-14) Menurut penulis sendiri miskin adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok baik makanan maupun non makanan untuk dirinya dan keluarganya.

Kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan ini kemudian dikonversikan dalam nominal rupiah dan dihitung per kapita. Dari penghitungan tersebut, BPS memperoleh angka kemiskinan di kota Padang tahun 2010 adalah sejumlah 52.700 orang dengan standar garis kemiskinan Rp. 306.108,-.

Dari penjelasan di atas, maka yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah peranan atau bagian yang dimainkan oleh KJKS BMT Kota Padang sebagai sebuah LKMS dalam upaya meningkatkan aktivitas ekonomi serta kekayaan masyarakat yang hidup serba kekurangan.

1. **Penelitian Terdahulu**

Dari penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul ini. penelitian tersebut antara lain:

* 1. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan. Sebuah artikel ilmiah yang ditulis oleh Wiloejo Wirjo Wijono. Penelitian ini menitikberatkan pada 2 pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana menjadikan LKM semakin berkembang bahkan menjadi salah satu pilar dari sistem keuangan nasional. Kedua, bagaimana meningkatkan peran LKM dalam mendukung pemberdayaan UKM. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:[[15]](#footnote-15)
1. Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, antara lain dengan memperluas akses Usaha Kecil dan Mikro (UKM) dalam mendapatkan fasilitas permodalan yang tidak hanya bersumber dari lembaga keuangan formal tapi juga dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM),
2. LKM ternyata mampu memberikan berbagai jenis pembiayaan kepada UKM walaupun tidak sebesar lembaga keuangan formal, sehingga dapat menjadi alternatif pembiayaan yang cukup potensial mengingat sebagian besar pelaku UKM belum memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan,
3. Potensi yang cukup besar tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal, karena LKM masih menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan antara lain aspek kelembagaan yang tumpang tindih, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan LKM dan kecukupan modal,
4. Upaya untuk menguatkan dan mengembangkan LKM sebagai salah satu pilar sistem keuangan nasional, di antaranya yang mendesak adalah menuntaskan RUU tentang LKM agar terdapat kejelasan dalam pengembangan LKM. Serta komitmen pemerintah dalam memperkuat UKM sebagai bagian tidak terpisahkan dari pengembangan LKM.
	1. Peranan BMT Taqwa Cabang Lubuk Buaya dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Miskin di Lubuk Buaya. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Ruri Sefriyeni tahun 2009. Penelitian ini menitikberatkan pada peranan yang dilakukan BMT Taqwa Cabang Lubuk Buaya terhadap pembangunan ekonomi masyarakat di Lubuk Buaya. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa BMT Taqwa Cabang Lubuk Buaya belum efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan di Lubuk Buaya. Keberadaan BMT Taqwa Cabang Lubuk Buaya sendiri belum begitu diketahui oleh masyarakat Lubuk Buaya. Selain itu, pinjaman yang diberikan lebih diutamakan kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil di rumah.[[16]](#footnote-16)

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan utama terletak pada objek penelitian. Penelitian ini akan dilakukan terhadap KJKS BMT Kota Padang. Selain itu, fokus penelitian ini juga berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini menitikberatkan pada dampak pembiayaan dan pembinaan yang dilakukan KJKS BMT Kota Padang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat miskin di Kota Padang.

1. **Metode Penelitian**
2. **Wilayah Penelitian**

Saat ini ada 74 KJKS BMT yang sudah beroperasi di Kota Padang. Karena penelitian ini melihat peranan KJKS BMT dalam rentang waktu 2010 s/d 2012, maka 20 KJKS BMT yang didirikan pada tahun 2011 tidak termasuk dalam penelitian ini. Berdasarkan besar volume pembiayaan KJKS BMT di masyarakat per Desember 2011, penulis membuat pengklasifikasian ke dalam 3 kelas, yaitu:[[17]](#footnote-17)

* 1. Rendah: besar dana yang disalurkan ke masyarakat berkisar antara Rp. 0,- s/d Rp. <300.000.000,-. KJKS BMT yang termasuk dalam kelompok ini adalah KJKS BMT Kelurahan Jati Baru, KJKS BMT Kelurahan Banuaran, KJKS BMT Kelurahan Pitameh, KJKS BMT Kelurahan Tj. Saba, KJKS BMT Kelurahan Belakang Pondok, KJKS BMT Kelurahan Kampung Pondok, KJKS BMT Kelurahan Purus, KJKS BMT Kelurahan Padang Pasir, KJKS BMT Kelurahan Parak Karakah, KJKS BMT Kelurahan Jati, dan KJKS BMT Kelurahan Tarantang.
	2. Sedang: besar dana yang disalurkan ke masyarakat berkisar antara Rp. ≥300.000.000,- s/d <Rp. 500.000.000,-. KJKS BMT yang termasuk dalam kelas ini adalah KJKS BMT Kelurahan Cengkeh, KJKS BMT Kelurahan Kampung Baru, KJKS BMT Kelurahan Lubuk Begalung, KJKS BMT Kelurahan Piai Tanah Sirah, KJKS BMT Kelurahan Koto Baru, KJKS BMT Kelurahan Tanjung Aur, KJKS BMT Kelurahan Gurun Laweh, KJKS BMT Kelurahan parak Laweh P. Aia, KJKS BMT Kelurahan Pampangan, KJKS BMT Kelurahan Gates, KJKS BMT Kelurahan Kampung Jua, KJKS BMT Kelurahan Batung Taba, KJKS BMT Kelurahan Pasar Gadang, KJKS BMT Kelurahan Bukit Gado-gado, KJKS BMT Kelurahan Seberang Palinggam, KJKS BMT Kelurahan Belakang Tangsi, KJKS BMT Kelurahan Olo, KJKS BMT Kelurahan Gantiang Parak Gadang, KJKS BMT Kelurahan Kubu Marapalam, KJKS BMT Kelurahan Simpang Haru, KJKS BMT Kelurahan Sawahan, KJKS BMT Kelurahan Sawahan Timur, KJKS BMT Kelurahan Pasar Ambacang, KJKS BMT Kelurahan Baringin, KJKS BMT Kelurahan Berok Nipah, dan KJKS BMT Kelurahan Andalas.
	3. Tinggi: besar dana yang disalurkan ke masyarakat lebih dari Rp. ≥500.000.000,-. KJKS BMT yang temasuk dalam kelompok ini adalah KJKS BMT Kelurahan Padang Besi, KJKS BMT Kelurahan Teluk Bayur, KJKS BMT Kelurahan Mat Aia, KJKS BMT Kelurahan Rawang, KJKS BMT Kelurahan Rawang, KJKS BMT Kelurahan Batang Arau, KJKS BMT Kelurahan Air Manis, KJKS BMT Kelurahan Seberang Padang, KJKS BMT Kelurahan Ranah Parak Rumbio, KJKS BMT Kelurahan Alang Laweh, KJKS BMT Kelurahan Pengambiran Ampalu, KJKS BMT Kelurahan Ujung Gurun, KJKS BMT Kelurahan Kampung Jao, KJKS BMT Kelurahan Rimbo Kaluang, KJKS BMT Kelurahan Flamboyan Baru, KJKS BMT Kelurahan Parak Gadang Timur, KJKS BMT Kelurahan Korong Gadang, KJKS BMT Kelurahan Lubuk Lintah, dan KJKS BMT Kelurahan Anduring.

Setelah melakukan pengklasifikasian, penulis memilih 3 KJKS BMT yang terbaik di setiap kelasnya. Pengklasifikasian ini bertujuan untuk melihat perkembangan KJKS BMT dan memperbandingkan bagaimana peranan yang dapat mereka lakukan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat miskin sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Tiga KJKS BMT tersebut adalah KJKS BMT Kelurahan Padang Besi, KJKS BMT Kelurahan Cengkeh, dan KJKS BMT Kelurahan Jati Baru.

1. **Jenis dan Metode Penelitian.**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.[[18]](#footnote-18) Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan.[[19]](#footnote-19) Penelitian ini digunakan untuk memahami makna di balik data untuk menemukan kebenaran.

Meskipun penelitian ini menggunakan metode kualitatif, bukan berarti data yang bersifat kuantitatif tidak digunakan sama sekali. Peneliti kualitatif sering menggunakan data kuantitatif, namun yang terjadi pada umumnya tidak menggunakan analisis kuantitatif bersama-sama.[[20]](#footnote-20) Meskipun penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penulis juga menggunakan data kuantitatif seperti jumlah volume pembiayaan, jumlah margin pembiayaan, data pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah menjadi anggota KJKS BMT dan lain sebagainya. Namun data-data tersebut dianalisa secara kualitatif.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[[21]](#footnote-21) Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan secara apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala, atau keadaan.

1. **Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu: data primer dan data sekunder.

* + - 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber yang pertama. Data primer dalam penelitian ini adalah data berupa hasil wawancara dengan manager, anggota, dan pihak lain yang terkait dengan KJKS BMT Kota Padang.

* + - 1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak-pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.[[22]](#footnote-22) Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data kemiskinan yang diperoleh dari BPS, data nasabah KJKS BMT, dan data-data penunjang penelitian lainnya.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).[[23]](#footnote-23) Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan suatu cara pengumpulan data atau informasi langsung dari informan dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka.

Wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu meyusun panduan wawancara sebagai pedoman dalam menggali informasi dari informan. Lexy. J. Moleong mendefenisikan informan sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan *key informan* (informan kunci) haruslah berdasarkan seleksi dan memperhatikan pengetahuan dan keterlibatannya dalam situasi sosial yang diteliti.[[24]](#footnote-24)

Pada dasarnya, informan penelitian dipilih dengan maksud dan tujuan untuk melihat peran pembiayaan dan pembinaan yang dilakukan KJKS BMT terhadap peningkatan ekonomi masyarakat miskin. Oleh sebab itu, kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini lebih ditekankan kepada mereka yang mempunyai kedekatan atau terlibat aktif dengan KJKS BMT Kota Padang. Adapun *key informan* dalam penelitian ini adalah Manajer KJKS BMT Kelurahan Padang Besi, Manajer KJKS BMT Kelurahan Cengkeh, Manajer KJKS BMT Kelurahan Jati Baru serta 44 anggota yang merupakan RTM dari tiga KJKS BMT tersebut.

1. Observasi

Dalam arti luas observasi berarti bahwa peneliti secara terus-menerus melakukan pengamatan atas perilaku seseorang. Pengertian observasi yang lebih sempit adalah mengamati (*watching*) dan mendengarkan (*listening*) perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian, serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan ke dalam tingkat penafsiran analisis.[[25]](#footnote-25) Observasi dalam penelitian ini dilakukan terhadap pelayanan KJKS BMT, pembinaan yang dilakukan, dan usaha masyarakat miskin yang menjadi nasabah KJKS.

1. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini, penulis juga mempelajari dokumen-dokumen yang telah ada untuk memperkuat analisis penelitian. Dokumen tersebut di antaranya: Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/per/K.UKMI/I/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syari’ah, Laporan Pelaksanaan Kegiatan KJKS BMT Kota Padang 2011, SOM & SOP KJKS BMT PAS, Panduan Pokusma, dan dokumen lainnya yang mendukung penelitian ini.

1. **Teknik Menguji Keabsahan Data**

Untuk mendapatkan data yang valid dan konsisten maka dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.[[26]](#footnote-26) Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi dengan melakukan pemeriksaan melalui sumber lainnya. Hal ini dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan oleh orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi sesuatu dokumen yang berkaitan.[[27]](#footnote-27)

Untuk menguji keabsahan data, dalam penelitian ini penulis melakukan triangulasi data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan perkataan dari Manager KJKS BMT dengan perkataan anggota, dokumen yang ada, dan hasil pengamatan.

1. **Teknik Analisa Data**

Analisa data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Step pertama dalam analisis adalah membagi data atas kelompok atau kategori-kategori.[[28]](#footnote-28) Analisa data dalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisa data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Namun, ketiga tahapan tersebut berlangsung secara simultan.[[29]](#footnote-29)

Data-data yang diperoleh dari lapangan pertama-tama akan direduksi. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa dengan membuang data yang tidak diperlukan dari catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan. Kemudian data disajikan dan diklasifikasikan berdasarkan kategori-kategori yang telah ditentukan. Setelah itu dilakukan verifikasi data dengan memperbandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Pada proses terakhir dilakukan interpretasi terhadap data. Interpretasi tidak lain adalah proses pemaknaan atau pencarian pengertian yang lebih luas tentang penemuan-penemuan.

1. BPS, *Angka Kemiskinan Tahun 2008, 2009, dan 2010*, (Padang: BPS, 2011), tanpa halaman [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdul Ghopur, *Indonesia dan Potret Kemiskinan,* <http://sosbud.kompasiana.com/2011/09/01/indonesia-dan-potret-kemiskinan/>, diakses tanggal 12 Agustus 2012 [↑](#footnote-ref-2)
3. Heri Ruslan, *Pengamat: Bantuan Langsung Tunai Tidak Efektif*, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/02/27/m011bn-pengamat-bantuan-langsung-tunai-tak-efektif>, diakses tanggal 12 Agustus 2012 [↑](#footnote-ref-3)
4. Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam : Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2009, h. 2 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*., h. 16 [↑](#footnote-ref-5)
6. Rusdi Jamil, Kepala Program KJKS BMT BPM PK Kota Padang, wawancara, 26 Maret 2012 [↑](#footnote-ref-6)
7. Rusdi Jamil, Kepala Program KJKS BMT BPM PK Kota Padang, wawancara, 26 Maret 2012 [↑](#footnote-ref-7)
8. Rel/Andre, *Wawako Padang Resmikan Sosialisasi* *KJKS*, <http://www.nusantaranews.net/2010/12/wawako-padang-resmikan-sosialisasi-kjks.html>, diakses tanggal 21 Februari 2012 [↑](#footnote-ref-8)
9. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 2, cet. 7, (Jakarta: Balai Pustakan, 1996), h. 751 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ahmad Ifham Sholikhin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 456 [↑](#footnote-ref-10)
11. SOM & SOP BMT: Panduan Operasional Manajemen & Prosedur KJKS BMT PAS, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), tanpa tahun, tanpa halaman. [↑](#footnote-ref-11)
12. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.Cit*., h. 251 [↑](#footnote-ref-12)
13. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, cet. 3, (Jakarta: Balai Pustakan, 2002), h. 749 [↑](#footnote-ref-13)
14. Hugo F. Reading, *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh Sahat Simamora, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 313 [↑](#footnote-ref-14)
15. Wiloejo Wirjo Wijono, *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan*, <http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kajian%5Cwiloejo-1.pdf> [↑](#footnote-ref-15)
16. Ruri Sefriyeni, *Peranan BMT Taqwa Cabang Lubuk Buaya dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Miskin di Lubuk Buaya,* (Faskultas Syari’ah IAIN Imam Bonjol, Padang, 2009) [↑](#footnote-ref-16)
17. Diolah dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan KJKS BMT Kota Padang 2011 [↑](#footnote-ref-17)
18. Burhan Bungin (ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 42 [↑](#footnote-ref-18)
19. Djam’an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 22 [↑](#footnote-ref-19)
20. Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2008) H. 203 [↑](#footnote-ref-20)
21. Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* cet. 6, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 54 [↑](#footnote-ref-21)
22. Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis,* cet. 5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 42 [↑](#footnote-ref-22)
23. Moh. Nazir, *Op.Cit*., h. 155 [↑](#footnote-ref-23)
24. Lexy J. Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 11 [↑](#footnote-ref-24)
25. James A. Black dan Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial* (Bandung: Eresco, 1992), h. 285-286 [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid*., h. 151 [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-27)
28. Moh. Nazir, *Op.Cit.*, h. 349 [↑](#footnote-ref-28)
29. Burhan Bungin (ed), *Op.Cit*., h. 144-145 [↑](#footnote-ref-29)